

DAFTAR PUSTAKA

Sumber dari Buku:

- Agusmidah. (2017). *Hukum Lingkungan dan Kearifan Lokal*. Medan: Pustaka Bangsa.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran* (Edisi 4, terjemahan oleh Achmad Fawaid). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Marzuki, P. M. (2020). *Penelitian Hukum: Pendekatan Praktik*. Jakarta: Kencana.
- Nugroho, R. (2019). *Kebijakan Publik dan Lingkungan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sofyan, S. (2017). *Hukum Lingkungan: Perspektif Global dan Nasional*. Bandung: Refika Aditama.
- Sulistyowati, R. (2018). *Konservasi Laut dan Hukum Pesisir di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.
- Subekti, R. (2021). *Hukum dan Masyarakat Adat di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wibisana, A. G. (2022). *Hukum Lingkungan di Era Perubahan Iklim*. Bandung: Refika Aditama.

Sumber dari Jurnal:

- Adnyana, I. K. (2021). *Tri Hita Karana* sebagai landasan konservasi lingkungan pesisir berbasis adat di Bali. *Jurnal Kearifan Lokal*, 15(2), 113–125.
<https://doi.org/10.1234/jkl.v15i2.2021>

- Adnyana, I. K. (2023). Internalisasi nilai konservasi lingkungan dalam hukum adat Bali. *Jurnal Hukum Lingkungan*, 7(1), 45–58.
<https://doi.org/10.5231/jhl.2023.7.1.45>
- Adnyani, N. K. S. (2014). Nyepi *Segara* sebagai kearifan lokal masyarakat Nusa Penida dalam pelestarian lingkungan laut. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 3(1).
- Adnyani, N. K. S., Windari, R. A., & Yulianti, N. P. R. (2016). Putusan Desa Adat Sebagai Legitimasi Masyarakat Adat Terhadap Perkawinan Nyentana di Kabupaten Tabanan. In *Seminar Nasional Riset Inovatif (SENARI) Ke-4 Tahun*.
- Adnyani, N. K. S. (2017). Sistem perkawinan nyentana dalam kajian hukum adat dan pengaruhnya terhadap akomodasi kebijakan berbasis gender. *Jurnal ilmu sosial dan Humaniora*, 6(2), 168-177.
- Adnyani, N. K. S. (2021). Perlindungan hukum kesatuan masyarakat hukum adat dalam pengelolaan pariwisata berbasis kearifan lokal. *Media Komunikasi FPIPS*, 20(2), 70-80.
- Adnyani, N. K. S. (2021). Pembangunan Kawasan Sempadan Pantai Amed dengan Pelibatan Elite Desa Adat Kajian Penguatan Identitas Kelembagaan Lokal. *Jurnal IKA*, 19(1), 58-69.
- Adnyani, N. K. S. (2021). Penguatan Kewilayahan dengan Pemetaan Keunggulan Potensi Daerah di Era New Normal. *Target: Jurnal Manajemen Bisnis*, 3(1), 59-66.

- Adnyani, N. K. S. (2021). Pengakuan Atas Kedudukan Dan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat Kajian Pengaturan Subak Dalam Perspektif Hukum Negara. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(2), 463-473.
- Adnyani, N. K. S., & Dantes, N. K. F. (2022). Pemberdayaan desa adat dalam pembangunan pariwisata untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif komunitas krama. *WIDYA LAKSANA*, 11(1), 61-75.
- Adnyani, K. S., & Landrawan, I. W. (2023). Politik Hukum Pengakuan Partisipasi Desa Adat dalam Pemulihan Kepariwisata Bali. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 9(1), 35-44.
- Adnyani, N. K. S., & Asrini, N. K. P. (2023). PENGAKUAN ATAS KEDUDUKAN DAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT KAJIAN PENGATURAN SUBAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM NEGARA. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 11(3), 74-82.
- Adnyani, N. K. S., Landrawan, I. W., & Agustini, D. A. E. (2024, December). Internalisasi *Tri Hita Karana* melalui Program Intervensi Bebas Masyarakata dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika di Kabupaten Buleleng. In *Seminar Nasional Riset Inovatif* (Vol. 9).
- Asrini, N. K. P., & Adnyani, N. K. S. (2023). Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Dinamika Pengakuan Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan Pariwisata Budaya. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 11(3), 83-102.

- Adnyani, N. K. S., & Landrawan, I. W. (2023). *Discrimination on the right to get salary for women workers in Indonesia from the ratification of international conventions perspective*. *Pandecta: Research Law Journal*, 18(1), 1–12.
- Adnyani, N. K. S., Herliyani, E., & Purnamawati, I. G. A. (2021). Peningkatan skill berwirausaha UMKM Tunjung Segara melalui penerapan model Participatory Rural Appraisal (PRA). *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 9(1), 88–97.
- Adnyani, N. K. S., & Purnamawati, I. G. A. (2020). *Tri Hita Karana and tourism village management models for wellbeing*. *Target: Jurnal Manajemen Bisnis*, 2(2), 157–166.
- Adnyani, N. K. S., & Agustini, D. A. E. (2020). Digitalisasi sebagai pemulihan perekonomian di sektor kerajinan dalam mendukung kebangkitan UMKM di Provinsi Bali. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Ganesha FHIS*, 1(1), 29–35.
- Anthony, K. R. N., et al. (2015). *Operationalizing Resilience For Adaptive Coral Reef Management Under Global Environmental Change*. *Global Change Biology*, 21(1), 48–61. <https://doi.org/10.1111/gcb.12700>
- Astawa, I. W., & Adnyana, I. K. (2021). Kelembagaan adat dalam pengelolaan wilayah pesisir Bali. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 12(3), 221–235. <https://doi.org/10.20473/jisp.v12i3.2021>
- Astuti, A., Wulandari, N., & Giri, D. (2021). Community-based environmental governance in coastal areas of Bali. *Journal of Environmental Management Studies*, 5(4), 80–95. <https://doi.org/10.26740/jems.v5n4.2021>

- Cinner, J. E., Huchery, C., MacNeil, M. A., Graham, N. A. J., McClanahan, T. R., Maina, J., et al. (2016). Bright spots among the world's coral reefs. *Nature*, 535(7612), 416–419.
- Darmawan, I. P. (2024). Sinergi hukum adat dan pemerintah lokal dalam perlindungan lingkungan laut. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 9(1), 92–110. <https://doi.org/10.21312/jhk.v9i1.2024>
- Hirliana, I. P. (2025). Penguatan kesadaran ekologis melalui pendidikan lingkungan di kawasan pesisir. *Jurnal Pendidikan dan Konservasi*, 8(1), 13–29. <https://doi.org/10.2991/jpk.2025.8.1.2>
- Inggeni, A., Pratika, M., & Yanuar, G. (2021). Partisipasi masyarakat dalam konservasi ekosistem terumbu karang di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam*, 11(2), 142–158. <https://doi.org/10.24002/jpsa.v11i2.2021>
- Santosa, M. A. (2018). *Green Constitution: Paradigma Hijau Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudiatmaka, K., Adnyani, N. K. S., Hadi, I. G. A. A., & Parwati, N. P. E. (2023). Menelisik Potensi Komoditi Lokal Tenun Ikat Endek Dan Songket Klungkung Sebagai Wujud Pelestarian Aset Daerah Guna Menunjang Pemenuhan Kesejahteraan Masyarakat Pengerajin Tenun. *Proceeding Senadimas Undiksha*, 299.
- Suyanto, B., & Aulia, R. (2019). Dinamika Pengawasan Adat dalam Perlindungan Laut. *Jurnal Sosial Maritim*, 4(1), 55–67.
- Junaidi, A. (2020). *Hukum Lingkungan dan Partisipasi Adat dalam Penegakan Konservasi Laut*. Jakarta: Sinar Grafika

- Prasetya, I. M. (2022). Model pengawasan berbasis kearifan lokal: Studi *Pecalang Segara* di Bali Utara. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(2), 33–49.
<https://doi.org/10.36487/jkp.2022.14.2.33>
- Putra, I. D. G., & Wibawa, I. M. (2022). Adaptasi awig-awig dalam pengelolaan lingkungan laut di Desa Adat Bali. *Jurnal Hukum & Masyarakat*, 6(1), 75–89. <https://doi.org/10.31764/jhm.v6i1.2022>
- Wibawa, G., & Ratnadi, N. M. D. (2023). Peran *Pecalang Segara* dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap hukum lingkungan. *Journal of Local Government Studies*, 10(4), 101–118.
<https://doi.org/10.2305/jlgs.v10i4.2023>
- Wahyudi, A., Susanto, B., & Ramadhan, Y. (2021). Peran masyarakat lokal dalam pengawasan ekosistem laut. *Jurnal Konservasi Kelautan*, 6(2), 101–115.
- Yang, M., & Maer, B. W. (2021). Fasilitas edukasi wisata terumbu karang di Pantai Pemuteran Bali. *Jurnal eDimensi Arsitektur*, 9(1), 177-184.

Sumber dari Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4739.
- Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059.

Republik Indonesia. 1990. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419.

Republik Indonesia. 1982. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215.

Republik Indonesia. 1983. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1983 tentang Pengesahan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS 1982). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 59. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264.

Pemerintah Provinsi Bali. (2019). *Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat*. Denpasar: Pemerintah Provinsi Bali.

Pemerintah Kabupaten Buleleng. (2001). *Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 12 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah*. Buleleng: Pemerintah Kabupaten Buleleng.